



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAKIP

2022

**LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**



**INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN**

“JUJUR DAN TERBUKA, MENJADI LEBIH BAIK”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen perjanjian kinerja Inspektur dengan Wali Kota Balikpapan dan selanjutnya pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Men PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022 selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Balikpapan, Februari 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja, dan perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja yang memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matriks Rencana Strategis Inspektorat Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi Wali Kota Balikpapan telah ditetapkan 1 Misi, 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja, maka capaian indikator sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dari tersebut adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian pada tahun 2022 sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu berada pada level 3.
2. Capaian indikator meningkatnya nilai SAKIP tahun 2022 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 16,70 karena terdapat perbedaan komponen dalam evaluasi AKIP pada tahun 2022 dengan saat ditetapkannya target tersebut yaitu tahun 2021.
3. Capaian indikator meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah pada tahun 2022 yaitu 32,17.

Untuk efektifitas penggunaan anggaran terhadap realisasi kinerja dapat dijelaskan bahwa :

1. Capaian sasaran kinerja meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran kegiatan yang mendukung sasaran tersebut cukup efektif.

2. Capaian sasaran kinerja meningkatnya nilai SAKIP jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran kegiatan yang mendukung sasaran tersebut cukup efektif.
3. Capaian sasaran kinerja meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran kegiatan yang mendukung sasaran tersebut sangat efektif.

Faktor yang berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam Renja 2022, antara lain :

1. Indikator kinerja/formulasi yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program harus tepat dan konsisten;
2. Penetapan target berbasis data;
3. Keberadaan sarana maupun prasarana yang representatif guna mendukung kelancaran pelaksanaan program..

Balikpapan, Februari 2023

**INSPEKTUR
KOTA BALIKPAPAN**

TIRTA DEWI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis	18
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	30
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026	32
3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	33
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	35
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	54
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	69
BAB IV. PENUTUP	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kepegawaian Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022	4
Tabel 1.2. Daftar Kendaraan Dinas/Operasional Inspektorat.....	9
Tabel 1.3. Daftar Aset Inspektorat	11
Tabel 1.4. Aspek Strategis Inspektorat Kota Balikpapan Sesuai Renstra Periode 2021-2026	14
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022	26
Tabel 2.4. Anggaran Belanja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	29
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	31
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2026.....	32
Tabel 3.4. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	34
Tabel 3.5. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022	35
Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	52
Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	55
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2022	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2022
3. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2022.....
4. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
6. Indikator Kinerja Individu (IKI)
7. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
8. Piagam Penghargaan Tahun 2022
9. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat
Tahun Sebelumnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem akuntabilitas tersebut dimaksudkan sebagai pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP diamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026;
- k. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor 188.46/13/ITKOT tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

- a. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran;
- b. Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja;
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

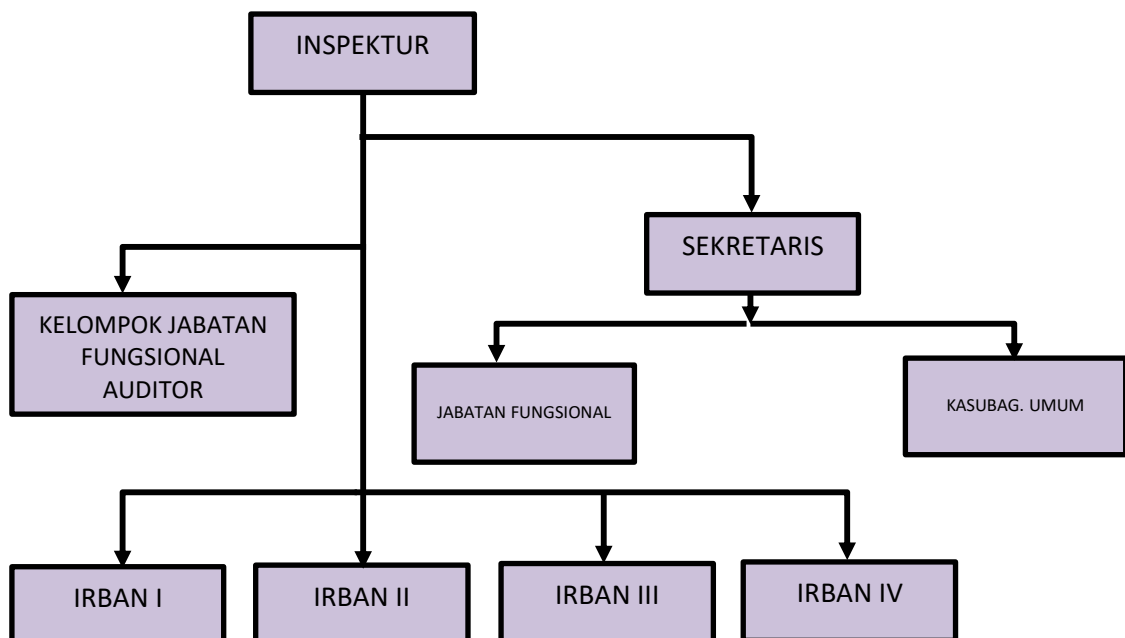
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun suatu instansi, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup instansi tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa struktur organisasi perangkat daerah diatur sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan



B. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sesuai dengan data kepegawaian tahun 2022, jumlah pegawai Inspektorat Kota Balikpapan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, yang terdiri dari 43 orang PNS dan 5 orang non PNS dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Kepegawaian Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan/ Eselon	Pangkat/ Gol	Pend	Status Kepegawaian	
		L	P				PNS	Non PNS
1.	Tirta Dewi, S.Sos, M.AP		√	Inspektur/ II.b	Pembina Utama Muda/ IV.c	S2	√	
2.	Amiruddin, S.H, M.H	√		Sekretaris / III.a	Pembina Tk.I/ IV.b	S2	√	
3.	Mahendra Candra, S.E	√		Inspektur Pembantu I/ III.a	Pembina/ IV.a	S1	√	
4.	Tommy Alfianto, S.Sos, MT	√		Inspektur Pembantu II/ III.a	Pembina Tk I/ IV.b	S2	√	
5.	Fitriana Harmastuti, S.Si.M.MG.M.Eng		√	Inspektur Pembantu III/ III.a	Pembina Tk I/ IV.b	S2	√	
6.	Fachrul Razji, S.STP, M.Si	√		Inspektur Pembantu IV/ III.a	Pembina / IV.a	S2	√	
7.	Drs.Yohanis Sodi Tumalla	√		Pengawas Pemerintah Madya	Pembina Tk I/ IV.b	S1	√	
8.	Taufik Mas Indra, SE	√		Auditor Madya	Pembina Tk, I/ IV.b	S1	√	

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan/ Eselon	Pangkat/ Gol	Pend	Status Kepegawaian	
		L	P				PNS	Non PNS
9.	Herawati, S.E		√	Auditor Madya	Pembina / IV.a	S1	√	
10.	Erna Purwati, S.E		√	Auditor Madya	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
11.	Andre Perdana S, S.T	√		Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
12.	Puput Trisdiyanto, S.E, Ak	√		Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
13.	Muchtar, A.Md	√		Auditor Penyelia	Penata Tk. I / III.d	D III	√	
14.	Agnes Sagita Dwi W, S.E		√	Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
15.	Retno Indrawati, S.Sos		√	Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
16.	Winda Hariyana, A.Amd		√	Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	D III	√	
17.	Lilyana, S.E.,Ak		√	Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
18.	Sudaryanto, S.H	√		Auditor Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
19.	Ahdini Faurina, S.Sos		√	Perencana Ahli Muda	Penata Tk. I / III.d	S1	√	
20.	Dyna Evi Septiana, S.STP		√	Perencana Ahli Muda	Penata / III.c	D IV	√	
21.	Nur Syahrul Mart K, S.E, M.SA, Ak		√	Auditor Muda	Penata / III.c	S2	√	

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan/ Eselon	Pangkat/ Gol	Pend	Status Kepegawaian	
		L	P				PNS	Non PNS
22.	Dewi Pamawati, S.T		√	Auditor Muda	Penata / III.c	S1	√	
23.	Karolin Dwi Anarinda, S.Sos		√	Auditor Muda	Penata / III.c	S1	√	
24.	Wahyuni, S.E, Ak		√	Auditor Muda	Penata / III.c	S1	√	
25.	Arief Rachmat, S.E	√		Pengadministrasi Khusus	Penata Muda Tk. I / III.b	S1	√	
26.	Andi Nurfahmi Syarniah, S.STP		√	Auditor Muda	Penata / III.c	D IV	√	
27.	Niti Kristyaningsih, S.Pt		√	Auditor Muda	Penata Muda Tk. I / III.b	S1	√	
28.	Linda Rosalini, A.Md		√	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk. I / III.b	D III	√	
29.	Vilma Isvandiary	√		Kasubag Umum	Penata Muda Tk. I / III.b	S1	√	
30.	Mulyono	√		Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk. I / III.b	SMA	√	
31.	Iin Wulandari		√	Analisis Evaluasi Audit	Penata Muda / III.a	S1	√	
32.	M. Hermanto M.B.H, S.T	√		Calon Ahli Pertama - Auditor	Penata Muda / III.a	S1	√	

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan/ Eselon	Pangkat/ Gol	Pend	Status Kepegawaian	
		L	P				PNS	Non PNS
33.	Rahsiawaty Musmar		√	Pengadminist rasi Persuratan	Pengatur Tk. I / II.d	SMA	√	
34.	Heny Puspitarini, A.Md		√	Auditor Pelaksana Lanjutan	Pengatur Tk. I / II.d	D III	√	
35.	Natasia Husain		√	Bendahara Pengeluaran	Pengatur Tk. I / II.d	SMA	√	
36.	Arie Widiayanti, A.Md		√	Auditor Pelaksana	Pengatur Tk. I / II.d	D III	√	
37.	Kanigia, A.Md	√		Auditor Pelaksana	Pengatur Tk. I / II.d	D III	√	
38.	Rina Oktavia Saputri, A.Md		√	Verifikator Keuangan	Pengatur / II.c	D III	√	
39.	Rizka Silvaekariani, A.Md		√	Auditor Pelaksana	Pengatur / II.c	D III	√	
40.	Rizki Silvadwianggraini, A.Md		√	Auditor Pelaksana	Pengatur / II.c	D III	√	
41.	Nur Hidayah Bonggi, A.Md		√	Auditor Pelaksana	Pengatur / II.c	D III	√	
42.	Samsudin	√		Pengambil Sampel	Pengatur Muda Tk. I / II.b	SMA	√	
43.	Anggit Tri Prasetyo	√		Pengemudi	Pengatur Muda Tk. I / II.b	SMA	√	
44.	Sri Yanti, S.E		√	Pengadminist rasi Evaluasi		S1		√

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan/ Eselon	Pangkat/ Gol	Pend	Status Kepegawaian	
		L	P				PNS	Non PNS
		45.	Agus Fitriono, S.E				√	
46.	Adi Saputra, A.Md	√		Pengadminist rasi Perencanaan Program		D III		√
47.	Firli Afifah		√	Pengadminist rasi Umum		S1		√
48.	Muhammad Iqbal, S.ST	√		Pengadminist rasi Umum		S1		√

Sumber Data : Inspektorat, Desember 2022

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Tugas Inspektorat adalah membantu Wali Kota untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Fungsi Inspektorat meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sarana dan Prasarana Kerja

Penunjang kinerja Organisasi Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, baik berupa sarana dan prasarana kerja yang terdiri dari peralatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas/operasional sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Kendaraan Dinas/Operasional Inspektorat Kota Balikpapan

No.	Jenis Kendaraan Dinas/Operasional	Merk/ Model	Nomor Polisi	Jumlah (Unit)	Kondisi
Kendaraan Roda 4 :					
1.	Kendaraan Penumpang	Mitsubishi Pajero sport HP 4x2) 5T	KT 1037 A	1	Baik
2.	Kendaraan Utilitas Sport /Sport Utility Vehicle	Toyota hilux 2.5 DC (4x4) M/T	KT 8239 A	1	Baik
3.	Kendaraan Penumpang	Toyota KF 70 short	KT 1065 AZ	1	Baik
4.	Kendaraan Penumpang	Suzuki GC415V APV DLX	KT 1058 H	1	Baik
5.	Kendaraan Penumpang	Suzuki Escudo	KT 1820 H	1	Baik
6.	Kendaraan Penumpang	Suzuki Carry	KT 1805 A	1	Baik
7.	Kendaraan Penumpang	Suzuki Carry	KT 1796 A	1	Baik
8.	Kendaraan Penumpang	Toyota	KT 1950 H	1	Baik
9.	Kendaraan Penumpang	Suzuki GC415V APV STD	KT 1842 A	1	Baik
10.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1440 H	1	Baik
11.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1974 H	1	Baik
12.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1451 H	1	Baik
13.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1476 H	1	Baik

No.	Jenis Kendaraan Dinas/Operasional	Merk/ Model	Nomor Polisi	Jumlah (Unit)	Kondisi
14.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1481 H	1	Baik
15.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1454 H	1	Baik
16.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza 1.3 G AT	KT 1448 H	1	Baik
17.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza Veloz	KT 1757 A	1	Baik
18.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza Veloz	KT 1759 A	1	Baik
19.	Kendaraan Penumpang	Toyota avanza Veloz	KT 1840 A	1	Baik
20.	Kendaraan Penumpang	Toyota KF 70 short	KT 1624 H	1	Baik
21.	Kendaraan Penumpang	Suzuki APV	KT 1017 H	1	Baik
Jumlah				21	
Kendaraan Roda 2 :					
1	Sepeda Motor	Honda NF12A1CF M/T	KT 2451 AZ	1	Baik
2	Sepeda Motor	Honda NF 100 TD	KT 2030 AZ	1	Baik
3	Sepeda Motor	Honda NF 100 TD	KT 2031 AZ	1	Baik
4	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 2778 A	1	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 2592 A	1	Baik
6	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 2702 AZ	1	Baik
7	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 2106 H	1	Baik
8	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 2107 H	1	Baik
9	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 2105 H	1	Baik
10	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 XCSD	KT 3683 A	1	Baik
Jumlah				10	

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2022

Aset yang dimiliki Inspektorat Kota Balikpapan berupa peralatan dan mesin diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Aset Inspektorat Kota Balikpapan

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Electric Generating Set	1	Unit	Baik
2	Stationery Water Pump	1	Unit	Rusak
3	Roll meter	2	Buah	Baik
4	Jangka Berkaki	2	Buah	Baik
5	Scanner	11	Buah	Baik
6	Alat Ukur Lainnya	2	Buah	Baik
7	Lemari Penyimpanan	5	Unit	Baik
		1	Unit	Rusak
8	Mesin ketik	2	Buah	Rusak
9	Mesin Hitung Listrik	1	Buah	Rusak
10	Mesin Foto Copy	1	Buah	Rusak
11	Lemari Besi	1	Buah	Baik
12	Filling Besi/ Metal	7	Paket	Baik
13	Band Kas	1	Buah	Rusak
14	Papan Visual	1	Paket	Baik
15	Alat Penghancur Kertas	5	Unit	Baik
16	Papan Pengumuman	9	Unit	Baik
17	White Board	2	Unit	Baik
18	Peta	1	Buah	Baik
19	Mesin Absensi	2	Buah	Baik
20	Laser Pointer	1	Buah	Rusak
21	Lemari Kayu	4	Buah	Baik
		8	Buah	Rusak

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
22	Meja Rapat	11	Buah	Baik
23	Meja Tulis	16	Buah	Baik
24	Kursi Rapat	46	Buah	Baik
25	Kursi Tamu	44	Buah	Baik
26	Kursi Putar	13	Buah	Rusak
27	Kursi Lipat	10	Buah	Rusak
28	Meja Komputer	6	Buah	Rusak
29	Meja Piket	1	Buah	Baik
30	Meja Biro	3	Buah	Kurang Baik
31	Sofa	17	Buah	Baik
32	Mesin Potong Rumput	1	Buah	Rusak
33	AC Sentral	1	Buah	Baik
34	AC Split	29	Buah	Baik
35	Kompor Gas	1	Buah	Baik
36	Tabung Gas	1	Buah	Baik
37	Televisi	4	Buah	Baik
38	Loudspeaker	2	Buah	Baik
39	Sound System	2	Buah	Baik
		1	Buah	Rusak
40	Microphone Floor Stand	1	Buah	Rusak
41	Microphone Table Stand	13	Buah	Baik
42	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	Baik
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Buah	Baik
44	Tangga Aluminium	1	Buah	Baik
45	Dispenser	1	Buah	Baik
46	Handycam	1	Buah	Baik
47	PC Unit	32	Buah	Baik
48	Laptop	41	Buah	Baik
		3	Buah	Rusak
49	Note Book	9	Buah	Baik
50	Palm Top	1	Buah	Rusak
51	Printer	57	Buah	Baik
		2	Buah	Rusak
52	Hard Disk Eksternal	11	Buah	Baik
53	Server	1	Buah	Baik
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	21	Buah	Baik
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	44	Buah	Baik
58	Meja Tamu Ruangan Biasa	4	Buah	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	Baik
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	21	Buah	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah	Baik
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	53	Buah	Baik
63	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	30	Buah	Baik
64	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Buah	Baik
65	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
66	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Buah	Baik
67	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	23	Buah	Baik
		2	Buah	Rusak
68	Proyektor +Attachment	2	Buah	Baik
		1	Buah	Rusak
69	Microphone/Wireless MC	2	Buah	Baik
70	UPS	25	Buah	Baik
71	Digital Audio Tape Recorder	2	Buah	Baik
72	LCD/Infocus	2	Buah	Baik
73	Layar/Screen Otomatis	3	Buah	Baik
74	Telephone(PABX)	1	Buah	Baik
75	Facsimile	1	Buah	Baik
		1	Buah	Rusak
76	CCTV	1	Buah	Baik
77	Concrete Hammer Test	1	Buah	Baik
78	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah	Baik
79	Pita Ukuran (meteran)	1	Buah	Baik
80	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Buah	Baik
		1	Buah	Rusak
81	Alat Olahraga Lainnya	1	Buah	Baik
82	Alat Pembersih Lain-lain	2	Buah	Rusak
83	Alat Kantor Lainnya	31	Buah	Baik
84	Alat Pengering Tangan	2	Buah	Baik
85	Handphone	1	Buah	Baik

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2022

1.5. Isu Strategis

A. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis merupakan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi perangkat daerah, maka sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026 diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Aspek Strategis Inspektorat Kota Balikpapan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	a. Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pengawasan internal b. Penguatan peran APIP sebagai catalyst dan consulting partner bagi Perangkat Daerah
2.		Meningkatnya nilai SAKIP	Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
3.		Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Nilai RB diperoleh dari pembobotan komponen pengungkit 60% dan komponen hasil 40%. Setiap subkomponen pada komponen pengungkit dan komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan subkomponen tersebut

Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan 2021-2026

B. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Tantangan, permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, antara lain masih diperlukannya :

1. Dukungan stakeholder sebagai upaya mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Optimalisasi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*) guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah;
4. Komitmen semua pihak dalam rangka mewujudkan APIP Inspektorat Kota Balikpapan sebagai quality assurance dan consulting atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sub bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan

1.2 Landasan Hukum

Pada sub bab ini disajikan penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini disajikan maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan gambaran singkat terkait perangkat daerah, kedudukan, tugas dan fungsi organisasi serta kewenangan perangkat daerah. Selain itu pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah

pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan. terkait tugas, fungsi dan kewajiban serta struktur organisasi.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Pada sub bab ini disajikan aspek strategis Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi dan permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini disajikan pokok bahasan dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menjelaskan tentang rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan perjanjian kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan.

2.1 Rencana Strategis

Pada sub bab ini menguraikan secara singkat visi, misi, tujuan dan sasaran seperti termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Pada sub bab ini menyajikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah tahun 2022.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada sub bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi dan misi Pemerintah Daerah yang selaras dengan tujuan, strategi, kebijakan, serta program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.

Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Misi yang harus dicapai oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026.

Tujuan dan sasaran kinerja disebutkan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	6.77	7.42	7.42	7.43	7.43	7.43
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.54	31.84	32.14	32.44	32.74	33.04

Sumber : Renstra Inspektorat Kota Balikpapan 2021-2026

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2022 sesuai dengan Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
						Reviu Laporan Kinerja
						Reviu Laporan Keuangan
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	7.42	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
					Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31.84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor 188.46/13/ITKOT tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat, Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 menjadi dasar dalam penentuan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3
2	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	Nilai	7.42
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31.84

Sumber Data : Inspektorat Kota Balikpapan, 2022

Pada tahun 2022, Inspektorat Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 14.629.910.800,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp 15.298.367.800,-. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	611.878.250,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	488.150.000,00	APBD Perubahan
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	
	Reviu Laporan Kinerja	-	
	Reviu Laporan Keuangan	-	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	488.150.000,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	123.728.250,00	APBD Perubahan
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.228.250,00	APBD Perubahan
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	112.500.000,00	APBD Perubahan
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	711.569.912,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	56.225.000,00	APBD Perubahan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	56.225.000,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	655.344.912,00	APBD Perubahan
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	135.120.000,00	APBD Perubahan
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.568.912,00	APBD Perubahan
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	296.312.000,00	APBD Perubahan
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	171.344.000,00	APBD Perubahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.974.919.638,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.880.936.400,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.880.936.400,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.425.000.000,00	APBD Perubahan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	640.000.000,00	APBD Perubahan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	785.000.000,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	884.434.338,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.696.000,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.289.700,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.403.300,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.355.000,00	APBD Perubahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.690.338,00	APBD Perubahan
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.548.100,00	APBD Perubahan	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.180.000,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.003.000,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.365.100,00	APBD Perubahan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.035.000.000,00	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000,00	APBD Perubahan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000,00	APBD Perubahan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.000.000,00	APBD Perubahan
Jumlah		15.298.367.800,00	APBD Perubahan

Sumber : DPA Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022

Kemudian disajikan matriks anggaran setiap sasaran strategis pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis
Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	611.878.250,00	3,99	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Meningkatnya nilai SAKIP	711.569.912,00	4,67	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	13.974.919.638,00	91,34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : DPA Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Adapun tabel skala nilai peringkat kinerja yang digunakan dalam penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$90,01\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Level 3	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	Nilai	7.42	16,70	225%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31.84	32,17	101%	Sangat Tinggi

“Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 142% pada tahun 2022 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.” Dengan demikian maka secara umum Inspektorat Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026.

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Berdasarkan target yang ditetapkan, adapun realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022-2026 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi					% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (6-5/5*100\%)$
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Level 3	-	-	-	-	0%
2	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	Nilai	6,77	16,70	-	-	-	-	146%
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31,54	32,17	-	-	-	-	1,99%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun 2022 adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada trend peningkatan realisasi pada 2 (dua) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sasaran I : Meningkatnya nilai SAKIP
- Indikator : Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi
- Analisis : Terdapat peningkatan 146% pada nilai SAKIP Kota komponen evaluasi dikarenakan terdapat perbedaan komponen evaluasi SAKIP di tahun 2022 dengan tahun 2021 pada saat penentuan target awal.
-
- Sasaran II : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
- Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
- Analisis : Terdapat peningkatan 1,99% pada nilai reformasi birokrasi perangkat daerah dari hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi.

3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Berdasarkan target yang ditetapkan, adapun realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7 = 5/6 * 100$
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Level 4	90%
2	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	Nilai	16,70	7.43	224%
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	32,17	33.04	97%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target jangka menengah pada Renstra. Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan realisasi capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022, adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75%)	Rendah (50,01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	100%	√				
2	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	225%	√				
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	101%	√				

Pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus di evaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan indikator kinerja kapabilitas APIP menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja Level 3 dari target Level 3.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja yaitu hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dilingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Beberapa solusi/upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk mengatasi atau meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan di lingkungan APIP mengacu pada 6 (enam) elemen penilaian kapabilitas APIP
2. Mendokumentasikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan di lingkungan APIP
3. Membentuk tim Kapabilitas APIP berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor : 188.46-16/ITKOT tentang Tim Kapabilitas APIP Inspektorat

Kota Balikpapan Tahun 2022.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai SAKIP

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya nilai SAKIP dengan indikator kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 225% dengan realisasi kinerja 16,07 dari target 7,42.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja yaitu Inspektorat Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas internal terhadap seluruh perangkat daerah.

Beberapa solusi/upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk mengatasi atau meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut sebagai berikut:

1. Evaluasi LAKIP sebagai salah satu pemeriksaan/pengawasan yang tertuang dalam PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan.
2. Melakukan evaluasi secara populasi terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Balikpapan yaitu 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) tim sesuai dengan pembagian wilayah pemeriksaan/pengawasan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi LAKIP selama 10 (sepuluh) hari kerja terhadap 5 (lima) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Dokumen yang dievaluasi yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu serta Rencana Aksi.



Renstra 2021-2026



Rencana Kinerja Tahunan

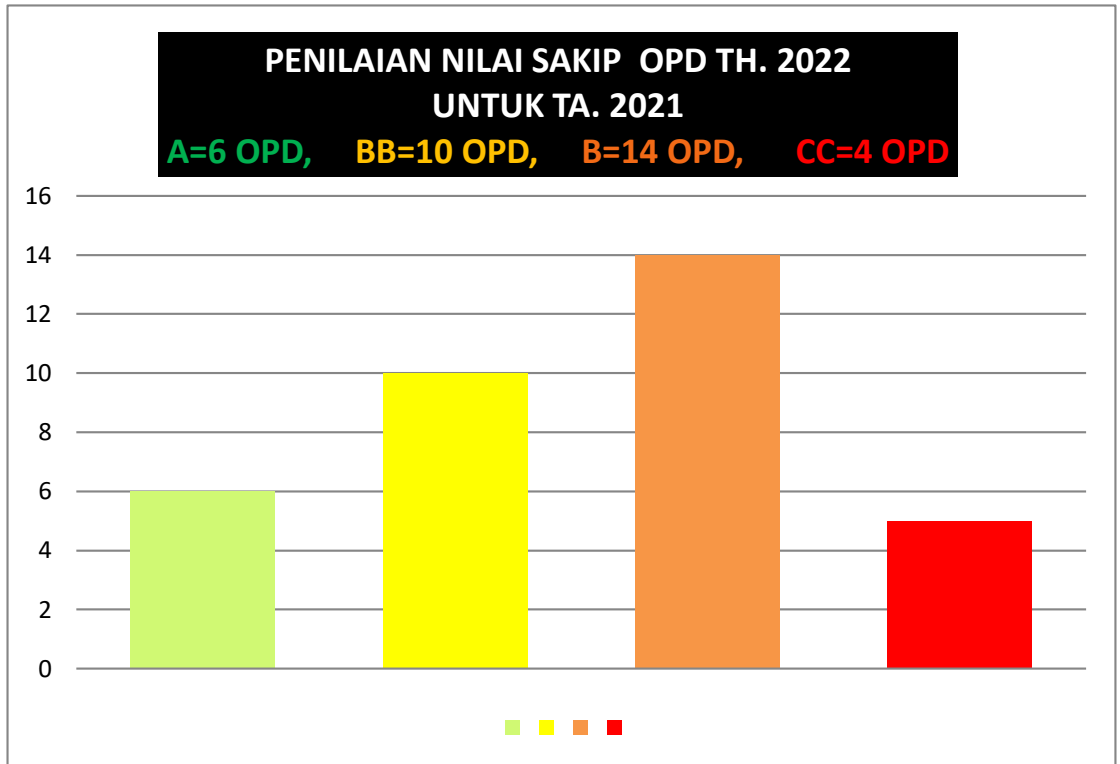
Rencana Aksi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100 dengan kategori A, BB, B dan C. Adapun hasil evaluasi LAKIP tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:
- 7 (tujuh) perangkat daerah dengan kategori A
 - 10 (sepuluh) perangkat daerah dengan kategori BB
 - 15 (lima belas) perangkat daerah dengan kategori B
 - 4 (empat) perangkat daerah dengan kategori C



Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat

Daerah dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 101% dengan realisasi kinerja 32,17 dari target 31,84.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja yaitu Inspektorat telah memenuhi pencapaian 8 (delapan) area perubahan baik pemenuhan maupun reform, yaitu :

1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem manajemen SDM
6. Penguatan akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas layanan publik

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen:

1. Pengungkit (Enablers) adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya
2. Hasil (Results) adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit

Beberapa solusi/upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk mengatasi atau meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerapan reformasi birokrasi dalam 8 (delapan) area perubahan baik pemenuhan maupun reform.
2. Mendokumentasikan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
3. Membentuk tim reformasi birokrasi di internal Inspektorat Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor : 188.46-08/2022 tentang TIM Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Balikpapan.

Adapun dokumentasi penerapan dan penilaian mandiri reformasi birokrasi sebagai berikut:

INSPEKTORAT		Penilaian	Skor	Penjelasan	Poin	Jumlah	Nilai	%
A. PENINGKATAN			36,30				36,30	86,97%
1. Peningkatan			14,40				14,40	5,87%
1. MANAJEMEN PERUBAHAN			2,00				2,00	1,50%
1. Tim Reformasi Birokrasi			0,40				0,40	1,00%
	a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk			a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai target ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	4	1,00	
	b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja			a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C/D	4	1,00	

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi



TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
Jalan Jendral Sudirman RT. 13 No. 1 (Telp. 0542) 49415, Balikpapan 76108
BALIKPAPAN

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 01 September 2022
Pukul : 12.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Kota Balikpapan
Acara : Rapat Internal Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TKD) dan SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan

NO.	NAMA	JABATAN	A.	P.	TAMBAH TANGAN
1.	Yetti Diani	Inspektur	✓	✓	[Signature]
2.	Amirudin	Sekretaris	✓	✓	[Signature]
3.	Yusuf Fauzi	Uraan W	✓	✓	[Signature]
4.	Muhammad Fauzi	PA. Hery	✓	✓	[Signature]
5.	Fitriandani	Uraan I	✓	✓	[Signature]
6.	Denny Heryanto	Uraan II	✓	✓	[Signature]
7.	Dipno Gus	Asisten Kepala	✓	✓	[Signature]
8.	Andreas Fauzan	Subdit Pembinaan	✓	✓	[Signature]
9.	Im. Widiandani	Praktis Fungsional	✓	✓	[Signature]
10.	Agus Yanti	Staf	✓	✓	[Signature]
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					




Rapat Pembahasan Penerapan Reformasi Birokrasi


1. Area Manajemen Perubahan



**Keputusan Inspektur
Nomor : 188.46-08/2022
Tentang
TIM RB Inspektorat
Kota Balikpapan**



**Keputusan Wali Kota Balikpapan
Nomor : 188.45-205/2019
Tentang
Road Map RB Pemerintah Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021**




**Roadmap RB
Kota Balikpapan
Tahun 2022-2026**


1. PEMENUHAN		14,60	12,68
1 MANAJEMEN PERUBAHAN		2,00	2,00
i.	Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
ii.	Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
iii.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,80
iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,40



**Perjanjian
Kinerja**



**Rencana
Aksi**



**Keputusan Wali
Kota Balikpapan
Nomor : 188.45-
229/2021
Tentang
Role Model dan
Agen Perubahan
Pemerintah Kota
Balikpapan**



**Pelatihan Penguatan
Asessor**

2. Area Deregulasi Kebijakan

- Inspektorat melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
- Selain itu juga perlu dilakukan revisi beberapa kebijakan/sop/pedoman di bidang pengawasan, untuk menyesuaikan dengan struktur dan organisasi yang baru sebagaimana penyederhanaan organisasi
- Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
- Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja



Pemenuhan		1,00	0,50
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	0,50
-	Harmonisasi	1,00	0,50

Reform		2,00	2,00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00
-	Peran Kebijakan	2,00	2,00



3. Penataan Penguatan Organisasi

- Inspektorat Bersama dengan Bagian Organisasi, BKPSDM dan Bagian Hukum Telah Melakukan Evaluasi Untuk :
- 1) menilai kesepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi
 - 2) mengukur seluruh jenjang organisasi
 - 3) menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi
 - 4) menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan
 - 5) kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
 - 6) menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
 - 7) atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat
 - 8) menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi
 - 9) menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
 - 10) Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi



Rapat Penyederhanaan Struktur Organisasi

Jadwal Evaluasi Uraian Tugas



Keputusan Wali Kota Tentang Penyetaraan Jabatan



Rapat Finalisasi Penyusunan Uraian Tugas Perangkat Daerah

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2,00	2,00
I.	Evaluasi Kelembagaan	1,00	1,00
II.	Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1,50	0,75
-	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	0,75

4. Penataan Tata Laksana

4 PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,53
I. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,28
II. Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,25
4 PENATAAN TATALAKSANA	3,75	1,42
I. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan	0,50	0,17
II. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,25	1,25
III. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	2,00

Pemenuhan

Reform



Monev PPID



Keputusan Inspektur Tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial



Peta Rencana Arsitektur SPBE



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Peta Proses Bisnis



5. Penataan Sistem Manajemen SDM



Keputusan Inspektur Tentang Kode Etik APIP

Data Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas PNS



Pemenuhan

Reform

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan	0.20	0.20
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0.20	0.20
iii. Penetapan Kinerja Individu	0.40	0.40
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	0.20	0.20
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20	0.20
vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.20	0.20
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
i. Kinerja Individu	1.00	1.00
ii. Assessment Pegawai	0.50	0.50
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50	0.32



Aplikasi SIMPEG Non PNS



Aplikasi E Kinerja



Indikator Kinerja Individu

6. Penguatan Akuntabilitas



Undangan Rapat Penyusunan Renstra



LKjIP



DPA

Pemenuhan

Reform

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS		
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1.00	0.42
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1.00	1.00
iii. Pemberian Reward and Punishment	1.00	1.00
iv. Kerangka Logis Kinerja	0.75	0.75
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS		
i. Keterlibatan pimpinan	1.00	1.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50	1.31



Aplikasi E Sakip



Sosialisasi Aplikasi E Sakip



Cascading

Peraturan Wali Kota Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS

7. Penguatan Pengawasan

7. PENGUATAN PENGAWASAN		
i. Gratifikasi	2.30	2.30
ii. Penerapan SPIP	0.30	0.30
iii. Pengaduan Masyarakat	0.50	0.50
iv. Whistle Blowing System	0.30	0.30
v. Penanganan Benturan Kepentingan	0.30	0.30
vi. Pembangunan Zona Integritas	0.50	0.50

Pemenuhan



Laporan Benturan Kepentingan



7. PENGUATAN PENGAWASAN		
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat	1.95	1.95
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil	0.75	0.75
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60	0.60

Reform

Laporan Pengendalian Gratifikasi



Pakta Integritas



Keputusan Wali Kota tentang Penetapan UPTD DKK sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Hari Anti Korupsi Sedunia Dengan tema "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi"



7. Penguatan Pengawasan

Rekapitulasi Pengisian LHKPN



Keputusan Inspektur tentang Tim Pengelola Aspirasi dan Aduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR

Rekapitulasi Pengisian LHKASN



Whistle Blowing System

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Manajemen Risiko

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik



Indeks Kepuasan Masyarakat Internal



Standar Pelayanan



Publikasi Nilai IKM Internal



Layanan Pelaporan Gratifikasi Online

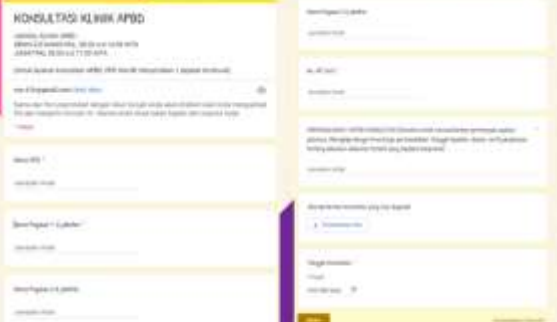
Pemenuhan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		2,50	1,75
i.	Standar Pelayanan	0,40	0,19
ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,09
iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,35
iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,62
v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,30

Reform

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		3,75	3,75
i.	Upaya dan/atau inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
ii.	Penganganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25

Layanan Konsultasi Klinik APBD Online



PROGRESS PENYEDERHANAAN BIROKRASI



Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 821/205/BKPSDM tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Pada Tahun 2022 telah dilakukan perubahan atas Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 karena berdampak penyederhanaan stuktur organisasi.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah



- Kasubag Perencanaan dan Keuangan → Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- Kasubag Evaluasi dan Pelaporan → Perencana Ahli Muda

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/049/REG/ITKOT, tanggal 11 April 2022, Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Balikpapan dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- a. Agar memanfaatkan secara maksimal informasi kinerja yang telah disajikan, guna perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja.
- b. Agar pemantauan dan evaluasi atas Rencana Aksi yang telah dilakukan dapat memberikan alternatif perbaikan untuk dilaksanakan dalam bentuk langkah-langkah nyata secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Agar Indikator Kinerja Individu yang tersajikan tidak hanya berupa kegiatan saja tapi harus terkait dengan kinerja atasannya .
- d. Agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pengumpulan data kinerja OPD.
- e. Agar melakukan evaluasi atas indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan yang masih berupa keluaran (*output*) dan bukan hasil (*outcome*)
- f. Agar melakukan perbaikan perhitungan dalam dokumen pengukuran dan menyiapkan data dukung (*evidence*) atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya.

Tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

- a. Telah memanfaatkan informasi kinerja secara maksimal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.



Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Rapat Evaluasi Renja

b. Telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi

**PENGUKURAN KINERJA ATAS RENCANA AKSI
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Data : Balikpapan
Instansi : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Aspek Strategic	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Aspek Kinerja (Program Kinerja)	Uraian hasil / dalam Sasaran Monev / Tindakan	Tingkat Lanjut Program atau Sasaran Kinerja Monev
1	Meningkatkan tingkat pencapaian dan kualitas pelayanan	Kapabilitas APD	Level 3	-	0%	Dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Kapabilitas APD	- Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis masalah - Menyusun hasil monitoring pelayanan kapabilitas APD	Membentuk Tim Kapabilitas APD Tahun 2022
2	Meningkatkan nilai LKIP	Nilai SAKIP pada Kompartemen Internal	7,47	-	0%	Dalam pelaksanaan nilai SAKIP Kota oleh Komunitas PAH SD	- Evaluasi tingkat pencapaian program kerja Program Tindakan (PCT) Diakses Risiko Tahun 2022 - Melakukan evaluasi terhadap Program Daerah (rencana kegiatan)	Dilakukan evaluasi Program Daerah melalui LKIP tahun 2022
3	Meningkatkan kualitas pelayanan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7,44	-	0%	Dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Reformasi Birokrasi	- Melakukan monitoring informasi kinerja dan perubahan yang diperlukan untuk pemantauan maupun evaluasi	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di semua Inspektorat Kota Balikpapan


 INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
 OETA 1001

Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi per triwulan

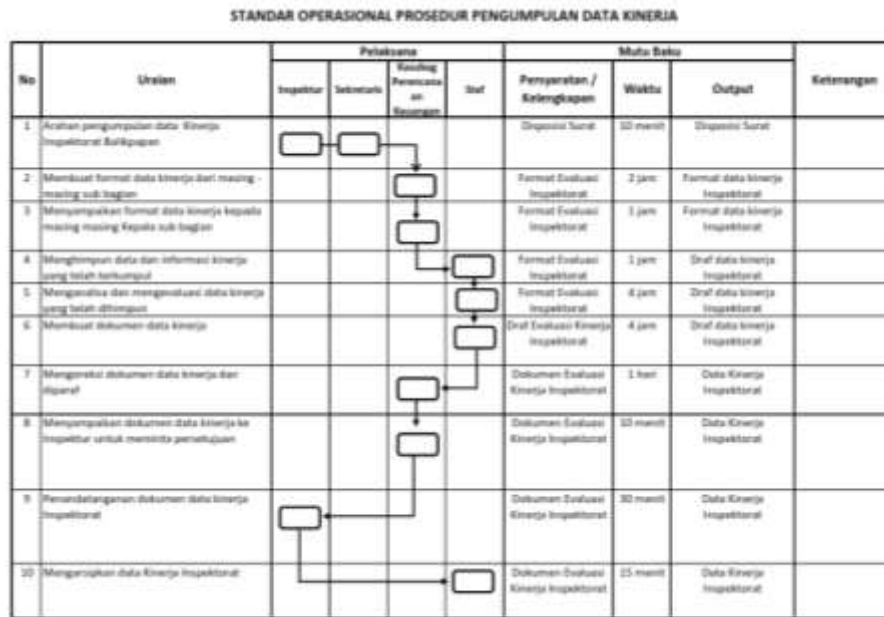
c. Indikator kinerja yang disajikan sudah terkait dengan kinerja atasan

**PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU BERDASARKAN
MATERI PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL**

PILGOWAL	JABATAN	INFORMASI ANGGARAN PELAKSANAAN			
		NAMA PELAKSANA	INDIKATOR KINERJA 1	INDIKATOR KINERJA 2	INDIKATOR KINERJA 3
DINDY ALFANDY	INSPEKTOR PEMBANTU II	Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
TARIM WAHYUDA	PENUNJANG TEKNIK	Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
AKYA SIDI	INSPEKTOR PEMBANTU II	Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
ANGGITA SIDI	PENUNJANG TEKNIK	Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4
		Indikator kinerja 1	Indikator kinerja 2	Indikator kinerja 3	Indikator kinerja 4

Indikator Kinerja Individu berdasarkan Matriks Pembagian Peran dan Hasil

- d. Telah membuat SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja



SOP Pengumpulan Data Kinerja

- e. Pada tahun 2022, indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan telah berupa *outcome* dengan rincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Layanan Internal
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- f. Telah dilakukan perhitungan pengukuran kinerja dan melampirkan data dukung atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Inspektorat Kota Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	Nilai	Level 3	Level 3	100%
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	Nilai	7,42	16,70	225%
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31,84	32,17	101%

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan monitoring realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Kota Balikpapan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dijelaskan pada tabel 3.6. Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.6

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	100%	611.878.250,00	465.815.358,00	76,12%	24%
2	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	7,42	16,70	225%	711.569.912,00	479.314.254,00	67,36%	70%
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,84	32,17	101%	13.974.919.638,00	12.431.352.991,00	88,95%	12%

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah realtif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100% tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2022 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian telah mencukupi dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 76,12% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 0.9924%.

Efisien tersebut terjadi pada program penyelenggaraan pengawasan, kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, sub kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu karena pada sub kegiatan tersebut dianggarkan apabila terdapat pemeriksaan khusus/investigasi. Ketika pemeriksaan khusus/investigasi tidak dilaksanakan menandakan bahwa tidak terdapat kasus yang harus diperiksa dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022.

2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran meningkatnya nilai SAKIP telah mencukupi dengan capaian kinerja 225% dan capaian penyerapan anggaran 67,36% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 0.9970%.

Efisien tersebut terjadi pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, kegiatan pendampingan dan asistensi, sub kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah serta sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sub kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas karena terdapat efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas.

3. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah telah mencukupi dengan capaian kinerja 101% dan capaian penyerapan anggaran 88,95% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 0.9912%.

Efisien tersebut terjadi pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi keuangan daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Kegiatan administrasi umum daerah, sub kegiatan penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- c. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	Kapabilitas APIP	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	102,29	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan	90,26	Menunjang
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja	614,29	Menunjang
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	69,35	Menunjang
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKJiP OPD dan LPPD	100	Menunjang
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah hasil reviu (RKPD/RAPBD/LKPD)	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah koordinasi tindak lanjut (TL) hasil rekomendasi BPK RI dan APIP yang dilaksanakan	100	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	114,28	Menunjang
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah fasilitasi penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	100	Menunjang
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	Menunjang
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi	225	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	233,33	Menunjang
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100	Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis fasilitasi pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah fasilitasi Pencegahan Korupsi	100	Menunjang
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah fasilitasi Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	100	Menunjang
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Layanan Internal	103,05	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,82	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,82	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan ASN yang telah ditandatangani	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,82	Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sertifikasi	240	Menunjang
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,82	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis jenis bahan logistik kantor	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82,15	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	140	Menunjang
				Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,82	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi surat menyurat	23,33	Menunjang
					Jumlah materai dan benda pos lainnya untuk layanan administrasi	90	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah frekuensi pembayaran jasa keamanan dan kebersihan	100	Menunjang
					Jumlah frekuensi pembayaran gaji Non PNS dalam satu tahun	100	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Atas Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,82	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	100	Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian

Dari tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja kapabilitas APIP telah tercapai sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Penyelenggaraan Pengawasan dengan capaian 102,29% dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan capaian 90,26% serta kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan capaian 114,28%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

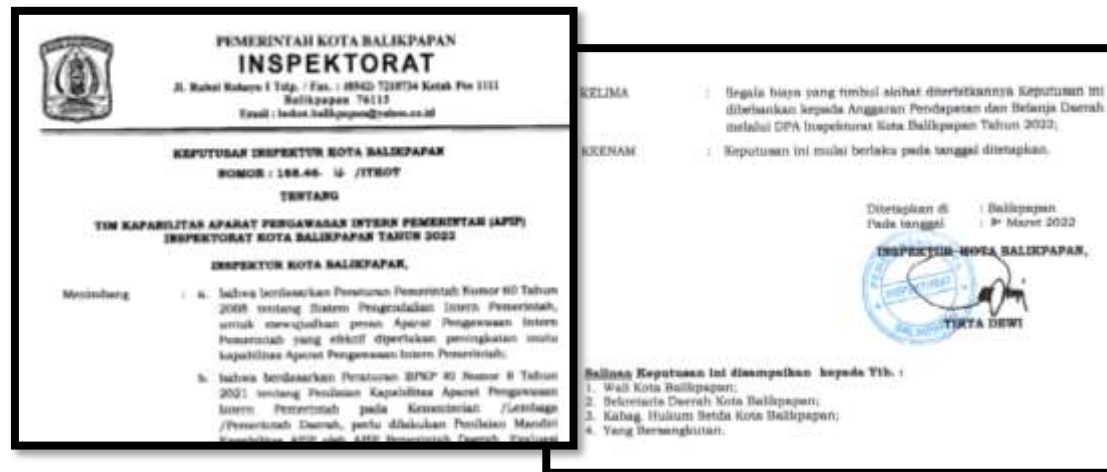
- a. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dimana di dalamnya terdapat sub kegiatan pemeriksaan/pengawasan yang menunjang keberhasilan tata kelola pemerintahan di lingkungan APIP. Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penilaian kapabilitas APIP K/L/D terdiri dari tiga komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif.

Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (enabler), Aktivitas Pengawasan (delivery), dan Kualitas Pengawasan (result). Komponen tersebut berawal dari logika berfikir hubungan antara input/masukan, proses, dan output/hasil. Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.

Inspektorat membentuk Tim Kapabilitas APIP berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor : 188.46-16/Itkot tentang Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2022.

Pemenuhan Enam elemen penilaian kapabilitas APIP dilakukan oleh tim kapabilitas APIP yang telah dibentuk. Enam elemen yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola



SK Tim Kapabilitas APIP Tahun 2022

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai SAKIP

Dari tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi telah tercapai sebesar 225%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan capaian 100% dan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan capaian 100% serta kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan capaian 100%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- a. Seluruh kegiatan dalam program Pendampingan dan asistensi memiliki dampak dalam pencapaian sasaran meningkatnya nilai SAKIP. Adapun kegiatan dalam menunjang pencapaian target adalah pendampingan asistensi pemerintahan daerah yang di dalamnya terdapat pendampingan SPIP. SAKIP pada dasarnya adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya SPIP. Sebaliknya, penyelenggaraan SPIP dapat mendukung penyempurnaan implementasi SAKIP. Selain itu terdapat kegiatan pendampingan reformasi birokrasi yang selaras dan mendukung pelaksanaan dan penerapan SAKIP.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Dari tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah telah tercapai sebesar 101%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 103,05% dan kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 82,82%, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 82,82%, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 82,82%, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 82,82%, kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 82,82% serta kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 82,82%, Adapun seluruh program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target.

Tercapainya target nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Balikpapan karena pemenuhan terhadap 8 (delapan) area perubahan baik pemenuhan maupun reform, yaitu :

1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem manajemen SDM
6. Penguatan akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas layanan publik

Berikut bukti dukung penerapan Reformasi birokrasi di Inspektorat Kota Balikpapan sehingga dapat mencapai target nilai yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat tahun 2021-2026:

1. Area Manajemen Perubahan

L. PEMENUHAN		14.00	12.68
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		2.00	2.00
I. Tim Reformasi Birokrasi		0.40	0.40
II. Road Map Reformasi Birokrasi		0.40	0.40
III. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		0.80	0.80
IV. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		0.40	0.40

REFORM		21.70	19.48
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		3.00	2.83
I. Komitmen dalam Perubahan		1.50	1.13
II. Komitmen Pimpinan		1.00	1.00
III. Membangun Budaya Kerja		0.50	0.30

2. Area Deregulasi Kebijakan

Pemenuhan		1.00	0.50
2. DEREGLASI KEBIJAKAN	- Harmonisasi	1.00	0.50

Reform		2.00	2.00
2. DEREGLASI KEBIJAKAN	- Peran Kebijakan	2.00	2.00

- Inspektorat melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/konflik/bersifat menghambat
- Selain itu juga perlu dilakukan revisi beberapa kebijakan/sop/pedoman di bidang pengawasan, untuk menyesuaikan dengan struktur dan organisasi yang baru sebagaimana penyederhanaan organisasi
- Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
- Kebijakan terkait pelayanan dan atau peraturan yang diberikan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja

3. Penataan Penguatan Organisasi

Pemenuhan		2.00	2.00
1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1.00	1.00
I. Evaluasi Kelembagaan		1.00	1.00
II. Tindak Lanjut Evaluasi		1.00	1.00

Reform		1.50	0.75
1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1.50	0.75
- Organisasi Berbasis Kinerja		1.50	0.75

- Inspektorat Bersama dengan Bagian Organisasi, BKPSDM dan Bagian Hukum Telah Melakukan Evaluasi Untuk:
- menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi
- mengukur seluruh jenjang organisasi
- menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi
- menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan
- kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
- menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
- atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat
- menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi
- menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
- Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

4. Penataan Tata Laksana

Pemenuhan		1.00	0.58
4. PENATAAN TATALAKSANA		0.50	0.28
I. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)		0.30	0.25
II. Keterbukaan Informasi Publik			

Reform		3.75	3.42
4. PENATAAN TATALAKSANA		0.50	0.17
I. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan		1.25	1.25
II. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2.00	2.00
III. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat			

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Keputusan Inspektur Tengah Kode Etik APJP

Data Kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas PNS

Pemenuhan

S. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40	1.40
I. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan	0.20	0.20
II. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0.20	0.20
III. Penetapan Kinerja Individu	0.40	0.40
IV. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	0.20	0.20
V. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20	0.20
VI. Sistem Informasi Kepegawain	0.20	0.20

Reform

S. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00	1.82
I. Kinerja Individu	1.00	1.00
II. Assessment Pegawai	0.50	0.50
III. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50	0.32

Reform

S. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00	1.82
I. Kinerja Individu	1.00	1.00
II. Assessment Pegawai	0.50	0.50
III. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50	0.32

Aplikasi SIMPEG Non PNS

Aplikasi E Kinerja

Indikator Kinerja Individu

6. Penguatan Akuntabilitas

Undangan Rapat Penyusunan Renstra

Aplikasi E Sakip

LKJIP

DPA

Sosialisasi Aplikasi E Sakip

Pemenuhan

S. PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	1.17
I. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1.00	0.42
II. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1.00	1.00
III. Pemberian Reward and Punishment	1.00	1.00
IV. Kerangka Logis Kinerja	0.75	0.75

Reform

S. PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.31
I. Keterlibatan pimpinan	1.00	1.00
II. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50	1.31

Cascading

Peraturan Wali Kota Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS

7. Penguatan Pengawasan

Rekapitulasi Pengisian LHKPN

Rekapitulasi Pengisian LHKASN

Keputusan Inspektur tentang Tim Pengelola Aspirasi dan Aduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR

Whistle Blowing System

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Manajemen Risiko

7. Penguatan Pengawasan

Pemenuhan

7. PENGUATAN PENGAWASAN	2.20	2.20
I. Gratifikasi	0.30	0.30
II. Penerapan SPIP	0.30	0.30
III. Pengaduan Masyarakat	0.50	0.50
IV. Whistle Blowing System	0.30	0.30
V. Penanganan Benturan Kepentingan	0.30	0.30
VI. Pembangunan Zona Integritas	0.50	0.50

Reform

7. PENGUATAN PENGAWASAN	1.95	1.95
I. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat	0.75	0.75
II. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil	0.60	0.60
III. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60	0.60

Pakta Integritas

Laporan Benturan Kepentingan

Laporan Pengendalian Gratifikasi

Hari Anti Korupsi Sedunia Dengan tema "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi!"

Keputusan Wali Kota tentang Penetapan UP TD DKK sebagai Zona Integritas menuju WBKWBMM

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Manajemen Risiko

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik



Indeks Kepuasan Masyarakat Internal



Publikasi Nilai IKM Internal



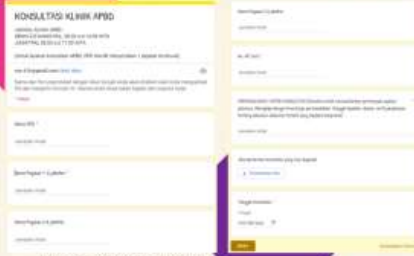
Standar Pelayanan



Layanan Pelaporan Gratifikasi Online

Pemenuhan	2021	2022
a. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	1,75
i. Standar Pelayanan	0,40	0,19
ii. Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,09
iii. Pengelolaan Pengaduan	0,00	0,35
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,62
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,30
ii. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75
i. Ulaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,50
ii. Peningkatan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	1,25

Reform



Layanan Konsultasi Klinik APBD Online

PROGRESS PENYEDERHANAAN BIROKRASI



Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 821/205/BK/PSDM tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Peningkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Pada Tahun 2022 telah dilakukan perubahan atas Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 karena terdampak penyederhanaan struktur organisasi.

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Jabatan Struktural : 9
Jumlah Jabatan yang disederhanakan : 2

Kasubag Perencanaan dan Keuangan → Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan → Perencana Ahli Muda

3.1.7 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 87,44% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran Meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian	611.878.250,00	479.314.254,00	78,33
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	611.878.250,00	479.314.254,00	78,33
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	488.150.000,00	444.863.650,00	91,13
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	-	-	
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	-	-	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	488.150.000,00	444.863.650,00	91,13
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	123.728.250,00	34.450.604,00	27,84

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.228.250,00	4.565.750,00	40,66
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	112.500.000,00	29.884.854,00	26,56
	Sasaran Meningkatnya nilai SAKIP	711.569.912,00	465.815.358,00	65,46
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	711.569.912,00	465.815.358,00	65,46
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	56.225.000,00	55.085.320,00	97,97
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	56.225.000,00	55.085.320,00	97,97
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	655.344.912,00	410.730.038,00	62,67
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	135.120.000,00	91.827.850,00	67,96
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.568.912,00	49.181.412,00	93,56
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	296.312.000,00	167.713.000,00	56,60
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	171.344.000,00	102.007.776,00	59,53

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	13.974.919.638,00	12.431.352.991	88,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.974.919.638,00	12.431.352.991	88,95
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	-	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.880.936.400,00	8.768.310.792,00	88,74
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.880.936.400,00	8.768.310.792,00	88,74
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.425.000.000,00	1.377.026.158,00	96,63
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	640.000.000,00	621.142.389,00	97,05
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	785.000.000,00	755.883.769,00	96,29
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	884.434.338,00	749.940.119,00	84,79

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.696.000,00	12.976.700,00	82,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.289.700,00	136.971.500,00	73,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.403.300,00	104.505.850,00	89,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.355.000,00	8.140.000,00	87,01
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.690.338,00	487.346.069,00	87,86
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.548.100,00	710.365.164,00	94,77
	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.180.000,00	4.679.500,00	90,34
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.003.000,00	154.539.624,00	88,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.365.100,00	551.146.040,00	96,80
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.035.000.000,00	825.710.758,00	79,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000,00	457.941.908,00	70,45
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000,00	111.535.850,00	89,23

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.000.000,00	256.233.000,00	98,55
Total		15.298.367.800,00	13.376.482.603,00	87,44

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Adapun capaian sasaran dan indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Capaian indikator meningkatnya lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian pada tahun 2022 sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu berada pada level 3.
2. Capaian indikator meningkatnya nilai SAKIP tahun 2022 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 16,70 karena terdapat perbedaan komponen dalam evaluasi AKIP pada tahun 2022 dengan saat ditetapkannya target tersebut yaitu tahun 2021.
3. Capaian indikator meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah pada tahun 2022 yaitu 32,17.

Adapun langkah yang harus dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi diantara Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah), Inspektur Pembantu, Sekretariat dan Fungsional Auditor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. Melaksanakan penerapan sistem akuntabilitas pada Inspektorat Kota Balikpapan;
3. Mendokumentasikan seluruh bentuk penerapan sistem akuntabilitas;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance dan Clean Government* yang

melibatkan Stakeholder sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, Februari 2023

